

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH,
PENGAWASAN MASYARAKAT, DAN TEMUAN AUDIT
BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Pulau Sumatera Tahun
Anggaran 2011-2012)**

**Afrizal Tahar, S.H., S.E., M.Acc., CA., Akt.
Linda Apriyanti
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pemerintah pusat dan belanja modal), pengawasan masyarakat dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/kota Se-Pulau Sumatera tahun anggaran 2011-2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 264 data yang terdiri dari 308 kabupaten/kota Se-pulau sumatera selama periode 2011-2012. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software Statistical Package for Social Sciences (SPSS)* versi 15.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, belanja modal dan pengawasan masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan, ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah pusat dan temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: karakteristik pemerintah daerah, pengawasan masyarakat, temuan audit, kinerja pemerintah daerah, evaluasi kinerja pemerintah penyelenggaraan daerah (EKPPD).

PENDAHULUAN

Sejak reformasi pada tahun 1998 berbagai perubahan terjadi di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan di pusat pemerintahan tetapi juga di daerah. Setelah terjadinya reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat

terpusat mulai mengalami desentralisasi (Ramdhani, 2013). Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), kemudian mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (UU No. 32/2004) yang menegaskan bahwa kewenangan Pemda untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi (Zulfikar, 2013).

Menurut UU No. 32/2004 selain memberikan kewenangan otonomi kepada pemerintah pusat, Pemda juga mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Berdasarkan pada pasal 2 PP No. 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemda, disebutkan bahwa pemerintah melakukan tiga bentuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) yang salah satunya yaitu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). EKPPD merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. EKPPD tersebut dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemda dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Widyastuti, 2014).

Ukuran Pemda merupakan jumlah aset yang dimiliki suatu daerah yang berguna sebagai daya pendukung dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga semakin besar ukuran Pemda yang ditandai dengan jumlah aset maka akan semakin maksimal kinerja Pemda untuk menjalankan tugasnya. Pemda juga memiliki tingkat kekayaan yang dikelola secara mandiri berupa Pendapatan Asli daerah (PAD). Pemda yang memiliki PAD tinggi seharusnya akan lebih maksimal memanfaatkan kekayaannya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah yang dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, sehingga kinerjanya juga diharapkan semakin maksimal dan dapat mencapai tujuan dengan baik (Mustikarini dan Fitriyani, 2012).

Setiap Pemda juga akan mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang menunjukkan tingkat ketergantungan Pemda kepada pemerintah pusat. Besaran DAU yang dialokasikan akan berguna dalam peningkatan pembangunan daerah,

sehingga akan mempengaruhi kinerja Pemda untuk lebih baik. Belanja modal biasanya terkait erat dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun, semakin banyak pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat (Zulfikar, 2013).

Keempat karakteristik Pemda dalam penelitian ini terdapat dalam suatu laporan keuangan pemda yang wajib diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). BPK merupakan badan milik negara yang berupa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimana salah satu hasil dari pemeriksaan berupa temuan audit. Semakin besar temuan audit akan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari Pemda tersebut kurang baik dan menandakan bahwa kinerja Pemda tersebut buruk, sehingga dapat dinyatakan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda (Zulfikar, 2013).

Selain itu dalam mengukur kinerja Pemda diperlukan adanya pengawasan terhadap kinerja Pemda seperti pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan masyarakat dilakukan sebagai pengawasan untuk mengetahui apakah otonomi daerah telah membuahkan capaian sesuai dengan yang diharapkan atau justru kontraproduktif dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Salah satu indikator kualitas pendidikan masyarakat adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Ketika suatu wilayah memiliki sumber daya manusia berkualitas maka wilayah ini akan jauh lebih berkembang dibanding wilayah lainnya (Arifianti dkk, 2013).

Penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) kurang mewakili hasil yang diharapkan karena sampel yang digunakan hanya 1 tahun. Penelitian sebelumnya hanya bisa menjelaskan 9,4% variabel dependen, dengan demikian sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan penelitian kembali. Permasalahan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012). Penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu pengawasan

masyarakat, serta mengubah variabel sebelumnya yaitu belanja daerah menjadi belanja modal sesuai saran penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Pengawasan Masyarakat, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2011-2012)”**.

RUMUSAN MASALAH

Apakah terdapat pengaruh antara variabel ukuran pemda, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, pengawasan masyarakat dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemda kabupaten/kota.

RERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut teori agensi, hubungan keagenan muncul ketika adanya hubungan satu orang atau lebih atau yang biasa disebut *principal* memberikan penugasan kepada orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa tertentu. Penugasan ini diikuti oleh pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Sutaryo dan Jakawinarna (2013) masalah keagenan dapat muncul karena setiap individu diasumsikan akan lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan individu lain. Berdasarkan asumsi ini kemungkinan akan terjadi kegagalan oleh agen dalam melaksanakan tugas dikarenakan agen lebih memilih untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Mengacu pada UU No. 32/2004 partisipan pada organisasi pemerintahan meliputi rakyat, bupati atau walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini menunjukkan bahwa bupati dan walikota berperan sebagai agen dan rakyat merupakan prinsipal dalam rerangka hubungan keagenan.

Berdasarkan teori keagenan, pengelolaan Pemda harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan pemerintahan dilakukan dengan penuh kepatuhan

terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satu wujud pengawasan tersebut di Indonesia yaitu dibentuknya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Selain pengawasan yang dilakukan oleh negara, masyarakat juga perlu melakukan pengawasan kepada Pemda. Pengawasan masyarakat dilakukan sebagai pengawasan untuk mengetahui apakah otonomi daerah telah membuahkan capaian sesuai dengan yang diharapkan atau justru kontraproduktif dengan apa yang telah direncanakan.

Pengembangan Hipotesis

1. Ukuran Pemda terhadap Kinerja Pemda

Sudarsana dan Rahardjo (2013) menyatakan bahwa ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian Sumarjo (2010) yang membuktikan bahwa ukuran Pemda berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menyatakan bahwa ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia.

Tujuan utama dari program kerja Pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda tersebut. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota.

2. Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemda

Zulfikar (2013) menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Hasil penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh

positif terhadap skor kinerja Pemda. Penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012) juga menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia.

Tingkat kekayaan daerah dapat dilihat dari PAD. Jumlah dan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja Pemda. Sumarjo (2010) juga menjelaskan bahwa peningkatan PAD merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Adi (2006) dalam Sumarjo (2010) menyebutkan bahwa peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja Pemda yang baik. Oleh karena itu, dengan semakin tinggi tingkat kekayaan daerah yang diukur berdasarkan PAD, maka seharusnya Pemda memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik, sehingga hal ini akan mencerminkan kinerja Pemda tersebut semakin baik. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemda kabupaten/kota.

3. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemda

Saraswati (2014) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan Pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Sumarjo (2010) mengungkapkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda. Penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda. Zulfikar (2013) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan Pemda berpengaruh terhadap kinerja Pemda.

Tingkat ketergantungan Pemda kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat dapat diukur dalam bentuk penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Semakin besarnya penerimaan DAU oleh satu daerah maka pemerintah akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibanding dengan daerah yang lebih sedikit penerimaannya. Hal ini memotivasi Pemda untuk

berkinerja lebih baik karena pengawasan dari Pemerintah Pusat lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi DAU dari Pemerintah Pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan Pemda kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pemda juga semakin meningkat. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃:Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemda kabupaten/kota

4. Belanja Modal terhadap Kinerja Pemda

Sudarsana dan Raharjo (2013) menyimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja Pemda. Namun berbeda dengan penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) menyimpulkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja Pemda Kabupaten/Kota. Zulfikar (2013) menyimpulkan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja Pemda.

Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Oleh karena itu semakin banyak pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga kinerja daerah menjadi lebih baik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar belanja modal maka semakin baik skor kinerja Pemda tersebut. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota.

5. Pengawasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemda

Arifianti dkk, (2013) menyatakan bahwa pengawasan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan datang. Amaliah (2004) menyatakan bahwa pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi datu II di Jawa Barat. Penelitian Pamungkas (2013) juga membuktikan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda.

Pengawasan masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Salah satu indikator kualitas pendidikan masyarakat adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Pembangunan manusia sangat mempengaruhi kinerja. Ketika suatu wilayah memiliki sumber daya manusia berkualitas maka wilayah ini akan jauh lebih berkembang dibanding wilayah lainnya. Sehingga semakin baik kualitas pembangunan manusia maka kinerja Pemda juga akan semakin baik. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: pengawasan masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota.

6. Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda

Penelitian yang dilakukan Zulfikar (2013) menyimpulkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Mustikarini dan Fitriasari (2012) menegaskan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda di Indonesia. Penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) juga menyimpulkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda.

Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemda Kabupaten/Kota Se-Pulau Sumatera. Periode penelitian mencakup data pada tahun anggaran 2011-2012, hal

ini dimaksudkan agar lebih mencerminkan kondisi saat ini. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Pemda Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera yang memiliki data yang lengkap sesuai dengan variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data dokumentasi diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari website Badan Pusat Statistik yaitu melalui <http://www.bps.go.id>. Temuan audit yang diperoleh dengan ikhtisar pemeriksaan semester I dan II tahun anggaran 2011-2012 pada website BPK yaitu melalui <http://www.bpk.go.id>. Serta data skor kinerja Pemda Kabupaten/Kota diperoleh melalui <http://otda.kemendagri.go.id>.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja Pemda. Nilai kinerja Pemda Kabupaten/Kota dapat dilihat pada laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan LPPD tahun 2011-2012.

2. Variabel Independen

a. Ukuran Pemda diperoleh dari total aset yang dimiliki Pemda. Data variabel dalam penelitian ini diperoleh dengan rumus:

$$\text{Ukuran Pemda} = \text{Ln}(\text{total aset pemda})$$

b. Tingkat kekayaan daerah diperoleh dari perhitungan PAD dibandingkan dengan total pendapatan. Data variabel dalam penelitian ini diperoleh dengan rumus:

$$\text{Tingkat kekayaan daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{total pendapatan}}$$

c. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berupa DAU dari pemerintah pusat. Data variabel dalam penelitian ini diperoleh dengan rumus:

$$\text{Tingkat ketergantungan pada pusat} = \frac{\text{DAU}}{\text{total pendapatan}}$$

- d. Belanja Modal dalam penelitian ini diperoleh dengan rumus:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{belanja modal}}{\text{total realisasi belanja}}$$

- e. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih, dan bebas KKN. Pengawasan masyarakat diukur melalui indeks pembangunan manusia. Data variabel penelitian ini diperoleh dengan rumus:

$$\text{pengawasan masyarakat} = \text{indeks pembangunan manusia (ipm)}$$

- f. Temuan Audit BPK

Temuan audit BPK diukur dengan temuan audit dibandingkan dengan total anggaran belanja. Konsisten dengan penelitian sebelumnya, maka variabel temuan audit BPK penelitian ini menggunakan rumus:

$$\text{Temuan Audit} = \frac{\text{temuan audit (Rp)}}{\text{total anggaran belanja}}$$

Uji Kualitas Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran penuh dari sebuah data yang akan kita gunakan. Analisis ini disajikan dengan menggunakan tabel *statistic descriptive* yang memaparkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (standard deviation).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari:

- a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test*. Data berdistribusi normal jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed) > α (0,05)* berarti data berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi. Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$, maka tidak terdapat multikolinieritas antara variabel independen (Ghozali, 2011).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas maka digunakan uji metode Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya atau nilai residual mutlak. Apabila nilai $\text{sig} > \alpha$ (5%) maka tidak terkena heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antar anggota sampel yang diturutkan berdasarkan waktu. Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung autokorelasi dapat digunakan pendekatan *Durbin Watson* (D-W). Menurut Santoso (2001) dalam Zulfikar (2013). Kriteria autokorelasi ada 3, yaitu:

- 1) Nilai D-W dibawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif.
- 2) Nilai D-W diantara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi.
- 3) Nilai D-W diatas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif.

Uji Hipotesis dan Analisis Data

Model pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji analisis regresi linear berganda. Adapun persamaan regresinya sebagai berikut:

$\text{SCORE}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{TA}_{it} + \beta_2 \text{PAD}_{it} + \beta_3 \text{DAU}_{it} + \beta_4 \text{BM}_{it} + \beta_5 \text{IPM}_{it} + \beta_6 \text{TEMUAN}_{it} + \varepsilon$

Keterangan :	
SCORE _{it}	: Skor kinerja pemda
α	: Konstanta
β _i	: Koefisien regresi
TA	: Total Aset
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
BM	: Belanja Modal
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
TEMUAN	: Temuan Audit BPK
ε	: koefisien error

1. Uji Nilai F

Uji nilai F bertujuan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikan. Jika nilai sig < α (alpha) 0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji Nilai t

Uji nilai t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Apabila nilai signifikansi t lebih kecil dari tingkat signifikansi α (alpha) 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Kriteria hipotesis diterima yaitu:

- a. Jika nilai sig < α (0,05).
- b. Jika nilai koefisien regresi searah dengan hipotesis.

3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Uji koefisien determinasi yaitu digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *Adjusted R²* dimana untuk menginterpretasikan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah dalam

bentuk presentase. Kemudian sisanya (100% - persentase determinasi) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah pemda kabupaten/kota Se-Pulau Sumatera tahun anggaran 2011-2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 264 pemda yang memenuhi kriteria pada tahun anggaran 2011-2012.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

TABEL 4.3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		264
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,39194786
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,057
	Negative	-,079
Kolmogorov-Smirnov Z		1,281
Asymp. Sig. (2-tailed)		,075

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Olahan

Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji normalitas yang menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang diperoleh melalui uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* (KS) sebesar 0,075 menunjukkan lebih besar dari α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menggunakan metode *variance inflation factor* (VIF) dan *Tolerance* disajikan pada table berikut:

TABEL 4.4

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,738	1,165		-,634	,527		
	TA	-,002	,033	-,003	-,050	,960	,890	1,123
	PAD	1,120	,524	,131	2,139	,033	,893	1,120
	DAU	1,203	1,180	,061	1,020	,309	,942	1,062
	BM	,998	,365	,160	2,735	,007	,982	1,019
	IPM	,040	,010	,248	3,938	,000	,841	1,189
	TEMUAN	-1,528	1,063	-,085	-1,437	,152	,967	1,035

a. Dependent Variable: SCORE

Sumber: Data Olahan

Tabel 4.4 menunjukkan nilai *tolerance* semua variabel independen dalam penelitian ini lebih besar dari 10% atau 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk semua variabel independen kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independen dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

TABEL 4.5

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,179	,698		,257	,798
	TA	,008	,020	,025	,390	,697
	PAD	-,279	,314	-,058	-,890	,374
	DAU	1,043	,707	,094	1,475	,142
	BM	-,299	,219	-,085	-1,367	,173
	IPM	-,002	,006	-,023	-,344	,731
	TEMUAN	,731	,637	,072	1,147	,253

a. Dependent Variable: AbsUt

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 4.5 hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel independen yang nilai signifikannya dibawah 0,05

(5%). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ditunjukkan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi.

Table 4.6

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,374 ^a	,140	,120	,3964967	1,278

a. Predictors: (Constant), TEMUAN, TA, BM, PAD, DAU, IPM

b. Dependent Variable: SCORE

Sumber: Data Olahan

Dari tabel 4.6 hasil pengujian autokorelasi dengan uji *Durbin-watson* sebesar 1,278. Nilai D-W menunjukkan $-2 < 1,278 < 2$ atau berada diantara -2 dan 2, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Nilai F

Uji nilai F yang terlihat pada tabel 4.8, pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

TABEL 4.7

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,558	6	1,093	6,953	,000 ^a
	Residual	40,403	257	,157		
	Total	46,961	263			

a. Predictors: (Constant), TEMUAN, TA, BM, PAD, DAU, IPM

b. Dependent Variable: SCORE

Sumber: Data Olahan

Hasil penelitian pada tabel 4.8 diperoleh nilai signifikansi $0,000 < \alpha (0,05)$ yang berarti variabel ukuran Pemda, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, pengawasan masyarakat, dan temuan audit BPK secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja Pemda.

2. Uji nilai t

Pengujian hipotesis sampai dengan hipotesis keenam dilakukan dengan menggunakan uji parsial (t test).

TABEL 4.8

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,738	1,165		-,634	,527
	TA	-,002	,033	-,003	-,050	,960
	PAD	1,120	,524	,131	2,139	,033
	DAU	1,203	1,180	,061	1,020	,309
	BM	,998	,365	,160	2,735	,007
	IPM	,040	,010	,248	3,938	,000
	TEMUAN	-1,528	1,063	-,085	-1,437	,152

a. Dependent Variable: SCORE

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$\text{Score}_{it} = -0,738 - 0,002\text{TA} + 1,120\text{PAD} + 0,203\text{DAU} + 0,998\text{BM} + 0,040\text{IPM} - 1,528\text{TEMUAN} + \varepsilon$$

Dari hasil model regresi tersebut diperoleh bahwa variabel PAD, BM dan IPM memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota.

3. Koefisien Determinasi

TABEL 4.9

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,374 ^a	,140	,120	,3964967

a. Predictors: (Constant), TEMUAN, TA, BM, PAD, DAU, IPM

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 4.7 tampak bahwa besaran koefisien determinasi (*Adjusted R square*) adalah 0,120 atau 12% yang berarti variabel independen (ukuran Pemda, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, pengawasan masyarakat, dan temuan audit BPK) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (kinerja Pemda) sebesar 12%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 88% (100% - 12%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

PEMBAHASAN

1. Ukuran Pemda terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Hasil penelitian untuk variabel pertama menunjukkan bahwa ukuran Pemda yang diproksikan dengan total aset Pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda, karena nilai signifikansi t sebesar $0,960 > \alpha (0,05)$ dan arah koefisien β negatif pada $-0,002$. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda Kabupaten/Kota. Ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota diduga karena Pemda belum bisa mengelola secara maksimal aset yang dimilikinya dan belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti sumber daya dan fasilitas yang disediakan belum memadai sehingga belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Diharapkan Pemda yang memiliki ukuran yang lebih besar untuk lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kinerja Pemda.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Zulfikar (2013) bahwa ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung hasil yang dilakukan Mustikarini dan Fitriasaki (2012) bahwa ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota.

2. Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Hasil pengujian untuk variabel kedua menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah diproksikan dengan PAD berpengaruh positif terhadap

kinerja Pemda Kabupaten/Kota, karena nilai signifikansi t sebesar $0,033 < \alpha (0,05)$ dan arah koefisien β positif pada $1,120$. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka akan semakin tinggi skor kinerja Pemda. Kekayaan daerah berasal dari PAD yang diterima Pemda akan digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah, sehingga akan semakin banyak kebutuhan infrastruktur daerah yang dapat terpenuhi. Dengan semakin banyak kebutuhan infrastruktur daerah yang dapat terpenuhi maka akan mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan Pemda kepada publik, dan dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan Pemda maka akan membuat kinerja Pemda semakin baik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka akan semakin baik kinerja Pemda Kabupaten/Kota.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriyani (2012). Akan tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Zulfikar (2013) bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota.

3. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Hasil pengujian untuk variabel ketiga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota, karena nilai signifikansi t sebesar $0,309 > \alpha (0,05)$. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota. Tidak berpengaruhnya tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, diduga karena DAU yang diterima oleh Pemda tidak dipergunakan dengan baik untuk membiayai program-program Pemda. Hal ini diduga karena jumlah belanja lebih besar dari pada pendapatan sehingga berpengaruh pada penggunaan anggaran yang kurang efisien dalam Pemda tersebut. Selain itu kemungkinan lain adalah Pemda tidak

transparan dalam melaporkan penggunaan DAU, serta penggunaan DAU yang tidak tepat sasaran.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Saraswati (2014) bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota. Akan tetapi hasil ini tidak mendukung hasil penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012) bahwa tingkat ketergantungan pusat berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota.

4. Belanja Modal terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Hasil pengujian untuk variabel keempat menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota, karena nilai signifikansi t sebesar $0,007 < \alpha (0,05)$ dan arah koefisien β positif pada 0,998. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar belanja modal yang didapat oleh Pemda maka semakin baik skor kinerja Pemda tersebut. Hal tersebut berarti belanja modal yang dilakukan oleh Pemda telah direalisasikan sebagaimana mestinya yaitu diprioritaskan untuk masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dengan semakin besar belanja yang dilakukan Pemda maka akan mencerminkan meningkatnya pelayanan yang diberikan Pemda kepada masyarakat, dan dengan semakin meningkatnya pelayanan yang diberikan Pemda kepada masyarakat maka akan menunjukkan kinerja Pemda yang semakin baik. Dengan demikian, semakin besar belanja modal maka akan semakin baik kinerja Pemda.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriasaki (2012). Akan tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan Sudarsana dan Rahardjo (2013) bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota.

5. Pengawasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Hasil pengujian untuk variabel kelima menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota, karena nilai signifikansi t sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ dan arah koefisien β positif pada 0,040. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh positif terhadap kinerja Pemda. Artinya, ketika kualitas pembangunan manusia baik maka kinerja juga akan meningkat. Sumber daya manusia (SDM) merupakan motor penggerak tumbuhnya perekonomian suatu wilayah. Ketika suatu wilayah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka wilayah ini akan jauh lebih berkembang dibanding daerah lainnya. Ini terjadi karena masyarakat di daerah tersebut lebih mudah dalam mengadopsi berbagai informasi maupun teknologi yang ada. Sehingga masyarakat dapat memantau kinerja yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten/Kota agar tidak terjadinya penyimpang atau penyalahgunaan kewenangan. Partisipasi masyarakat sangat penting karena pada dasarnya bentuk kebijakan otonomi dan desentralisasi harus tetap mengedepankan aspirasi dan kepentingan masyarakat. jika partisipasi rakyat di daerah tinggi maka proses terciptanya otonomi dan desentralisasi akan terlaksana dengan lancar dan baik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat akan meningkatkan pengawasan jalannya kinerja Pemda.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifianti dkk (2013) bahwa pengawasan masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2013) juga membuktikan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda.

6. Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Hasil pengujian untuk variabel keenam menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota, karena nilai signifikansi t sebesar $0,152 > \alpha (0,05)$. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap besarnya skor kinerja Pemda Kabupaten/Kota. Tidak berpengaruhnya temuan audit terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota, dikarenakan penilaian kinerja Pemda yang digunakan dalam penelitian ini lebih ditekankan pada penilaian LPPD yang dikirim oleh kepala daerah, dimana isi dari LPPD tersebut mencakup pencapaian penyelenggaraan 3 urusan dasar yang berhubungan langsung dengan kegiatan utama pemerintahan pada era otonomi daerah yang meliputi urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, dan diduga temuan audit yang merupakan laporan hasil pemeriksaan adalah informasi pelengkap dalam penilaian kinerja dan bukan merupakan informasi utama, sehingga dalam hal ini temuan audit yang terdapat dalam IHPS BPK tidak berpengaruh terhadap besarnya skor kinerja Pemda Kabupaten/Kota. Dengan demikian, temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Zulfikar (2013) bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriasari (2012) bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota.

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Pemda, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, pengawasan masyarakat dan temuan audit BPK terhadap kinerja Pemda. Berdasarkan analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara bersama-sama variabel ukuran Pemda, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, pengawasan

masyarakat, dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota.

2. Variabel ukuran Pemda, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota.
3. Variabel tingkat kekayaan daerah, belanja modal dan pengawasan masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan menjadi komponen dalam penilaian kinerja Pemda.
2. Penelitian berikutnya sebaiknya memperluas objek penelitian dengan menjangkau seluruh Kabupaten/Kota Se-Indonesia agar hasil dapat digeneralisasikan untuk seluruh Kabupaten/Kota.
3. Penelitian berikutnya sebaiknya periode waktu penelitian hendaknya lebih diperpanjang agar lebih akurat dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini belum bisa menggunakan data terbaru karena data terbaru belum lengkap saat dilakukan penelitian. Penggunaan data terbaru akan dapat memberikan gambaran yang terbaru dan akurat dari kinerja Pemda Kabupaten/Kota.
2. Penelitian ini hanya menggunakan enam variabel independen, sehingga hanya dapat menjelaskan 12% variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 88% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.
3. Sampel dalam penelitian ini hanya dibatasi pada Kabupaten/Kota tertentu, yaitu 154 Kabupaten dan Kota di pulau Sumatera. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk Kabupaten/Kota di pulau Sumatera, sehingga belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh Kabupaten/Kota.

4. Pengawasan masyarakat dalam penelitian ini hanya menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tidak secara langsung menunjukkan aktivitas pengawasan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Aun Sauma. 2014. "Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan". *Skripsi Sarjana. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Amaliah, Ima. 2004. Pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Kinerja Ekonomi dati II di Jawa Barat, 1999-2003. *Jurnal mimbar dikti* 22 (2): 213-233.
- Arens, A., Mark S. Beasley., Randal J. Elder and Jusuf, Amir abadi. 2011. *Jasa Audit dan Assurance: pendekatan terpadu (adaptasi Indonesia)*, Edisi 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Arifianti, Payamta, dan Sutaryo. 2013. "Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah". *Makalah Simposium Nasional Akuntansi* 16.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2011, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012*, Badan Keuangan Republik Indonesia.
- _____. 2011, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012*, Badan Keuangan Republik Indonesia.
- _____. 2011, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011*, Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- _____. 2012, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013*, Badan Keuangan Republik Indonesia.
- _____. 2012, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013*, Badan Keuangan Republik Indonesia.
- _____. 2012, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012*, Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2014, *Laporan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011 sampai 2012*, <http://www.bps.go.id>. Diakses pada 18 oktober 2014.

- Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Ramdhani, Iin Elvandari. 2013. "Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan Ekonomi, Serta Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah". *Skripsi Sarjana. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.*
- Saraswati, Zalza V. 2014. "Pengaruh Karakteristik Pemda terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di DIY dan Jawa Tengah". *Skripsi Sarjana. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.*
- Sudarsana, Hafidh Susila. 2013. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah". *Skripsi Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.*
- Sudarsana dan Raharhjo. 2013. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah". *journal ekonomi volume 2 (4):1-13.*
- Sumarjo, Hendro. 2010. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia". *Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.*
- Sutaryo dan Jakawinarna. 2013. "Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan". *Makalah Simposium Nasional Akuntansi 15.*
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- _____ Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- _____ Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Widyastuti, Desi. 2014. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota". *Skripsi Sarjana. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.*
- Zulfikar, 2013. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Pulau Jawa Tahun Anggaran 2009-2011". *Skripsi Sarjana. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.*